



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 908/IV/V/2016

DPR Sepakat Segera Bahas RUU PKS

DPR Targetkan 9 RUU Selesai
Pada Masa Sidang V

DPR Pertanyakan Lolosnya
Marry Jane Dalam Eksekusi Mati
Jilid Tiga



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



DPR Sepakat Segera Bahas RUU PKS

Serangkaian aksi kekerasan seksual akhir-akhir ini membuat masyarakat geram, tidak terkecuali anggota DPR. Hal itu mengemuka saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke-V DPR RI, Selasa (17/5), sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Anggota Komisi VIII Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan) dengan tegas mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi prioritas lima besar dalam Prolegnas 2015-2016. Sikap ini diikuti dengan menyerahkan pernyataan dari beberapa anggota DPR kepada Pimpinan DPR.

“Kami perempuan mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi prioritas Prolegnas 2015-2016,”katanya.

Interupsi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain. Ia menyampaikan, seharusnya pemerintah segera mengambil kebijakan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kekerasan seksual anak di bawah umur berdampak pada masa depan anak kita. Forum ini seharusnya mendesak

pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asean,” ujar Abdul Malik.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, anggota Komisi II dari F-PAN, Ammy Amaliya Fatwa Surya juga meminta agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diselesaikan dalam dua kali masa sidang. Pasalnya kejahatan seksual meningkat 80 persen dan mayoritas korbannya adalah anak-anak.

“Saat ini kondisi sudah darurat, mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Saya usul kepada Pimpinan Baleg agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera dibahas. Diharapkan dapat selesai dalam dua kali masa persidangan, karena ini sangat *urgent*. Kita perlu UU yang spesial, tidak hanya mengenai pemberatan hukuman, tapi juga rehabilitasi korban,” papar Ammy.

Sedangkan anggota Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendesak perlunya hukuman yang tepat akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pihaknya telah melakukan riset bahwa hukuman kebiri tidak memberikan efek jera, tetapi malah akan menimbulkan rasa balas dendam pada kemudian hari. Tolong, pemerintah pikirkan secara matang,”tegasnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berharap sikap tegas atas maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi secara masif dan sadis terhadap perempuan dan anak-anak. Pemerintah dapat memaksimalkan fungsi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) dan menghimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif ikut menanggulangi masalah ini di lingkungan masing-masing.

“Pemerintah perlu memaksimalkan fungsi P2TP2A dan harus diikuti dengan evaluasi bersama terhadap berbagai regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Penting pula untuk melakukan peninjauan terhadap hukuman bagi pelaku yang dapat memberi efek jera,” tuturnya. ■

Persiapan US SD Lebih Matang

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menilai, persiapan Ujian Sekolah (US) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sederajat pada tahun ini lebih matang. Pasalnya, hingga hari kedua pelaksanaan ujian, ia belum mendapat laporan permasalahan di lapangan. Sebagaimana diketahui, US SD telah berlangsung dari hari Senin (16/5) lalu.

“Belum ada masukan dari lapangan yang mengatakan apakah itu keterlambatan soal, kebocoran soal, ataupun permasalahan lainnya. Pemerintah lebih siap,” nilai Esti, saat ditemui usai Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Politisi F-PDI Perjuangan itu juga menilai, kesiapan peserta US SD juga lebih baik, karena sudah dipersiapkan sejak awal. US yang tidak menjadi satu-satunya penentu syarat kelulusan, membuat para orang tua juga semakin memahami dan tidak membebani anak.

“Anak-anak tidak seperti dulu yang terbebani, karena harus mendapatkan nilai tinggi. Secara psikologis hal itu menekan anak-anak. US bukan sesuatu yang berat harus dikerjakan. Kesiapan mental anak juga lebih baik,” analisa Esti.

Esti memberi catatan terkait hasil US SD yang akan menjadi alat ukur utama untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ia berharap agar sistem itu dapat ditinjau kembali. Pasalnya, ia banyak mendapat masukan dari para orang tua, agar system masuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sederajat, dikembalikan ke sistem tes.

“Kita berharap ada peninjauan

kembali, apakah hasil US menjadi satu-satunya sebagai pengukur ke jenjang berikutnya. Karena ada orang tua yang menyampaikan, lebih baik sistemnya kembali seperti dulu, yakni memakai tes,” kata politisi asal dapil DI Yogyakarta itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi mengaku, telah meninjau salah satu sekolah yang menghadapi US, yakni SD Negeri 2 Rawa Laut,

Bandar Lampung, pada Senin (16/5). Ia melihat, suasana sangat kondusif.

“US SD tidak terlalu mengkhawatirkan dibanding sekolah di tingkat atasnya. Kita lihat suasana kondusif di sana. Yang kita harapkan integritas sekolah dan peserta untuk melakukan kejujuran. Kejujuran dimulai dari diri kita untuk memberi contoh kepada anak-anak,” kata Dwita Ria.

Politisi F-Gerindra itu juga mengingatkan kepada sekolah, agar tidak membebani anak-anaknya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga memberikan bocoran jawaban kepada anak-anak.

“Kita harus menerapkan kejujuran. Mudah-mudahan tidak terjadi di US SD tahun ini,” harap politisi asal dapil Lampung itu. ■



Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayati.

(sf), Foto : Kresno/hr

BULETIN
PARLEMENTARIA



PENGAWASUMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanary, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si, (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak) Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis) Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuti, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Anianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail dpr.pemberitaan@gmail.com www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitan.dpr@gmail.com

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

DPR Apresiasi Kelancaran Pelaksanaan UN dan SNMPTN

Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi kelancaran pelaksanaan dan berkurangnya kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2016. Sebagaimana diketahui, UN tingkat SMA dan Sederajat telah digelar pada awal April lalu, dan menyusul pada awal Mei, untuk UN tingkat SMP dan Sederajat.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpidato pada sidang paripurna DPR

Demikian diutarakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-PD).

“Namun, DPR berharap Pemerintah

dan Penyelenggara SNMPTN yang terkait, dapat mencegah terulangnya kembali masalah yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Banyuwangi,” harap Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, sistem penyelenggaraan apapun yang dipilih sekolah, diharapkan menjadi yang terbaik untuk para siswa.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 380

siswa-siswa SMA Negeri 3 Semarang tak lolos SNMPTN 2016. Hal ini diakibatkan formulir seleksi SNMPTN berdasarkan Pangkalan Data Sekolah & Siswa (PDSS) *online*, ternyata ada nilai yang tidak terisi. Padahal seleksi SNMPTN itu berdasarkan PDSS yang berisikan riwayat nilai rapor siswa dari tahun pertama hingga tahun terakhir siswa. ■

(sf), Foto: Andri/hr

DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Negara



Suasana rapat paripurna pembukaan masa sidang ke V

Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 telah dibuka. Pada masa sidang ini, DPR bersama Pemerintah akan membahas RUU tentang APBN yang dimulai dengan Pembicaraan Pendahuluan atas RAPBN Tahun Anggaran 2017, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Hal itu menjadi salah satu poin dalam pidato pembukaan Masa Persidangan V yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pada saat Rapat

DPR Targetkan 9 RUU Selesai Pada Masa Sidang V

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di depan Sidang Paripurna Selasa (17/5) membuka masa persidangan V tahun 2015-2016, dengan menegaskan akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi yang memperhatikan kualitas RUU serta kuantitasnya dengan melihat kebutuhan yang ada.

“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR akan menyelesaikan pembahasan sembilan RUU dan melanjutkan pembahasan 16 RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah,” ujar Pimpinan DPR Korpolkam ini.

Adapun RUU yang menjadi target kerja pada masa sidang ini adalah RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*, RUU tentang Sistem Perbukuan, RUU tentang Kebudayaan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Selain itu, RUU Perubahan Kedua UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan disahkan pada masa sidang V ini. “DPR akan bekerja keras memanfaatkan masa sidang V untuk menyelesaikan pembahasan beberapa RUU,” tandasnya.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, RUU tentang Paten, RUU tentang Merek, dan RUU tentang perubahan UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang serta beberapa RUU lainnya, akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang V.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, RUU yang

Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5). Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-PD).

Fadli mengatakan, Pimpinan DPR mengingatkan kepada seluruh Anggota DPR agar dalam proses Pembahasan RAPBN Tahun 2017 betul-betul memperhatikan aspek yang menjadi prioritas pembangunan.

“DPR juga mendorong Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan negara bagi pembiayaan pembangunan, sehingga tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” kata politisi F-Gerindra itu.

Sementara itu, dalam menghadapi globalisasi yang juga memasuki pasar tenaga kerja, DPR mendorong Pemerintah agar menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang sudah ditetapkan, karena pertumbuhan ekonomi

pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

“Harga minyak yang diprediksi merosot dalam jangka pendek akibat stok mingguan Amerika Serikat yang kembali menembus rekor tertinggi, DPR mendorong Pemerintah untuk memiliki skenario kebijakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan jika harga minyak benar-benar merosot sesuai yang diprediksikan,” papar Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan, adanya potensi inflasi pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang ditandai dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok terutama beras, DPR meminta Pemerintah agar terus bertindak antisipatif dengan melakukan operasi pasar dan mendorong Bulog untuk meningkatkan serapan beras. ■



Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpidato pada sidang paripurna DPR.

akan dilanjutkan proses harmonisasinya di Badan Legislasi adalah RUU tentang Pertembakauan yang merupakan inisiatif dari Anggota DPR dari lintas fraksi. Disamping itu RUU tentang Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif dari Komisi III.

Dia juga menginformasikan, bahwa RUU yang saat ini masih menunggu surat Presiden adalah RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU tentang Arsitek, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Fadli menyampaikan, DPR dan Pemerintah RI tetap berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas tahun 2016. Masa sidang V ini dimulai dari 17 Mei sampai dengan 28 Juli.

“Untuk itu, Pimpinan DPR himbau kepada komisi-komisi, badan, dan pansus serta anggota DPR, agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi dengan memperhatikan kualitas RUU dan kuantitasnya,” papar Fadli. ■

(sf), Foto: Naefuroji/hr

(eko.mp), Foto: Rumi/hr

DPR Pererat Peran Diplomasi Parlemen

Pada masa persidangan V, DPR RI semakin memperkuat peran diplomasi parlemen. Padatnya agenda multilateral ini tentu akan membuat hubungan Indonesia dengan banyak negara semakin karib.

Pada masa sidang V ini ada lima agenda hubungan luar negeri DPR. Yang paling menonjol adalah seminar Parliamentary Global Action dengan tajuk “on Promoting Gender Justice and Rule of Law through Regulations at the National Level”. Yang membuat menarik adalah, seminar ini diselenggarakan di DPR RI pada 26 Mei 2016.

Seminar ini akan dihadiri narasumber dari lingkungan DPR RI, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memaparkan, dalam peran diplomasi parlemen, DPR akan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan, sidang dan konferensi organisasi parlemen regional. Meeting of Asia Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs Meeting, tanggal 1-2 Juni 2016 di Amman Yordania. Sidang ini membahas isu-isu terkait politik di Asia dalam perspektif parlemen.

“Selanjutnya, DPR juga akan mengirim delegasi untuk menghadiri kegiatan Kerja Sama Organisasi Internasional,” ujar Fadli saat memberi sambutan pidato



Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan V, Selasa (17/5).

Ada tiga sidang yang akan diseleng-

garakan, Sidang IPU 1st Parliamentary Session during the 69th World Health Assembly di Jenewa, Swiss pada 26 Mei 2016. Sidang ini akan membahas soal kesehatan terutama pada perempuan dan anak-anak, serta kesehatan pada umumnya, sesuai dengan kewenangan parlemen. Sidang Annual 2016 Session of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization di Jenewa Swiss pada 13-14 Juni 2016. Sidang ini bertujuan meningkatkan transparansi eksternal dari WTO.

Selanjutnya, sidang IPU World e-Parliamentary Conference di Chile pada 25-27 Juni 2016. Sidang ini membahas persiapan menghadapi perubahan teknologi informasi yang berkembang.

“Diharapkan informasi-informasi yang didapat dari sidang ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan sistem e-parliament di DPR,” ungkap Fadli. ■

(eko/mp) Foto: Jaka/hr

Puasa Melatih Fisik dan Rohani

“Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat,” hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan Yankes Setjen DPR RI menyelenggarakan seminar kesehatan bertajuk “Tetap Bugar dan Sehat Saat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan”.

Ahli Gizi serta Praktisi Kesehatan, Ani Prasetyaningsih menjelaskan tentang manfaat puasa, baginya ibadah puasa jika dijalankan dengan baik dan benar tentu menyehatkan. Dia mengatakan, “Puasa melatih fisik dan rohani,” Senin (16/5) di Gedung Nusantara II Lt. 3.

Dia menguraikan manfaat puasa bagi fisik yang melakukannya, akan berdampak pada tekanan darah dan kadar kolesterol lebih terkendali. Serta bisa membersihkan tubuh dari berbagai kotoran dan racun.

Ani melanjutkan, puasa juga bisa

meningkatkan fungsi organ-organ tubuh dan menghambat proses penuaan. Sehingga dengan beberapa manfaat yang telah disebutkan tadi, puasa dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Sedangkan manfaat puasa bagi rohani, Ani memaparkan, bisa mengendurkan ketegangan syaraf, menajamkan perasaan, serta mengurangi kecemasan dan rasa putus asa, tentu juga puasa melatih kesabaran.

Dia juga menguraikan beberapa bahan makanan yang baik dikonsumsi saat berpuasa. Daging putih, menurut

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyikapi seluruh persoalan hukum yang terjadi di Provinsi NTB, dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada.

“Saya apresiasi sekali, bahwa dengan segala keterbatasan dan kendala kinerja penegak hukum di lingkungan Prov. NTB tetap baik. Meskipun dengan persoalan klasik yang sering kami temui yaitu kurangnya anggaran, sarana prasarana. Namun Bambang berjanji akan membawa seluruh persoalan tersebut ke dalam Raker Komisi III DPR RI dengan Pemerintah,” kata Bambang saat Tim Kunker Komisi III melakukan pertemuan dengan Kapolda NTB dan jajaran penegak hukum Prov. NTB, Selasa, (2/5).

Bambang menerangkan, jika ditarik kesimpulan, masalah klasik yang sering dihadapi daerah yaitu keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas sarana dan prasarana sehingga dalam proses penegakan hukum mereka terkadang harus berkorban banyak dan berhutang.

“Aspirasi ini tentu akan kita sampaikan dan akan kita bawa ke Jakarta, yang masalah Polri kita akan sampaikan nanti ke Kapolri, masalah Kajati kita

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Penegak Hukum NTB

sampaikan ke Kejagung nanti, terutama masalah-masalah dana penanganan perkara yang sangat minim,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Mengenai BNN, tambah Bambang, BNN Prov. NTB diketahui kekurangan sarana dan prasarana juga personil. BNNP NTB hanya memiliki satu unit pistol dan dua senjata laras panjang dalam menjalankan tugasnya menghadapi para mafia narkoba, sehingga Bambang berharap aspirasi dari perwakilan pemerintah di daerah NTB dapat segera ditindak lanjut oleh pemerintah, dalam hal ini BNN pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga memaparkan persoalan hukum yang paling menonjol di daerah Lombok, Mataram dan sekitarnya adalah kejahatan kekerasan pada anak, kekerasan seksual dan tawuran antar warga. Untuk

itu dirinya berharap, dengan kekurangan dan kendala yang dimiliki para aparat penegak hukum di provinsi NTB, yang terpenting adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi koordinasi antar penegak hukum demi terwujudnya NTB damai dan nyaman.

Sementara itu dalam laporannya, Kapolda Provinsi NTB Umar Septono memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi Polda NTB dalam upaya menegakkan hukum di wilayah Lombok dan sekitarnya, salah satunya

kurangnya pos-pos polisi berikut personilnya di beberapa daerah di Lombok yang kerap terjadi kasus.

Kasus-kasus yang paling banyak terjadi dan ditangani oleh Polda NTB, ungkap Umar, adalah kasus Curat (Pencurian dengan pemberatan-red), curas (pencurian dengan kekerasan-red) dan yang korbannya adalah wisatawan asing, mengingat hal ini berhubungan dengan nama baik bangsa Indonesia secara Internasional.

“Kami meminta dukungan dari Komisi III DPR, dan juga harapan kami ke depan adalah pemenuhan kekurangan kebutuhan sarana prasarana dan anggaran, serta pembentukan Polres Lombok Utara untuk dapat diwujudkan pada Tahun 2017,” harap Umar.

Tim Kunker Komisi III DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo diikuti pula oleh Dwi Ria Latifa, Adies Kadir, Iwan Kurniawan, Wihadi Wiyanto, I Putu Sudiartana, Tjatur Sapto Edy, Muhammad Thoha, Tb. Soemandjaya, Aditya Mufti Arifin, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar. ■



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

Ani, daging jenis ini lebih mudah dicerna oleh tubuh dari pada daging merah. Susu dan yogurt, kedua bahan makanan ini merupakan sumber kalsium yang paling banyak sehingga baik untuk tubuh.

Ani juga mengatakan, keju juga merupakan bahan makanan yang baik dikonsumsi saat berpuasa.

“Banyak makanan yang dapat Anda buat menggunakan bahan dasar keju, seperti pasta, *cake* keju, puding keju dan *ice cream* keju,” ungkapnya.

Minyak zaitun juga masuk dalam



Abli Gizi Ani Prasetyangsib

daftar makanan yang baik dikonsumsi saat puasa, karena mengandung antioksidan. Tak luput juga sayur dan buah, karena makanan ini bisa memudahkan proses pencernaan.

Di akhir presentasinya dia menyampaikan masalah kesehatan hendaknya tidak menjadi ha-

langan untuk menunaikan ibadah puasa. Seminar yang bekerja sama dengan Light Hose ini dihadiri oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. ■

(eko), foto: runi/hr

(dya) foto: Nadya/hr

DPR Sambut Baik Pencabutan Pembekuan PSSI

Dewan Perwakilan Rakyat RI menyambut baik pencabutan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Pemerintah, yang diikuti oleh pencabutan sanksi oleh FIFA.



Suasana rapat paripurna pembukaan masa sidang ke V.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

“Ini menjadi momen penting untuk seluruh *stakeholder* sepakbola

Indonesia bersama-sama berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan kompetisi persepakbolaan Indonesia,” harap Fadli.

DPR juga berharap, tambah politisi asal dapil Jawa Barat itu, mulai bergulirnya secara resmi kompetisi PSSI dapat meningkatkan prestasi sepakbola nasional.

Apresiasi juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati.

Ditemui, usai Rapat Paripurna, Esti berharap dengan pencabutan pembekuan PSSI ini, liga-liga sepakbola yang selama ini dibekukan, juga dapat bergulir kembali.

“Pencabutan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan respon masyarakat sangat positif. Masyarakat juga berharap, liga-liga dapat segera digulirkan kembali. Ini menjadi titik awal kita untuk lebih membesarkan persepakbolaan nasional,” harap politisi F-PDI Perjuangan itu.

Esti juga menilai, momen ini sekaligus membuka jembatan komunikasi antara Komisi X DPR dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pasalnya, ada beberapa hal diantara Komisi X dengan mitra kerjanya itu yang tidak terkomunikasi dengan baik.

“Kita kan bisa melihat, selama ini rapat kerja antara Komisi X dengan Kemenpora, tidak dihadiri Menpora secara langsung, tapi hanya Sekretaris Kemenpora dan Dirjen-dirjen. Karena ada beberapa hal yang tidak terkomunikasi dengan baik,” nilai politisi asal dapil DI Yogyakarta itu.

Sebagaimana diketahui, pada pekan lalu Menpora Imam Nahrawi telah menandatangani SK pencabutan pembekuan PSSI. Keputusan ini disusul dengan pencabutan penangguhan sanksi kepada Indonesia oleh FIFA. ■

(sf) , Foto: Rumi/hr

Legislator Desak Pemerintah Peduli Kreatifitas Guru dan Siswa



Tim Kunker Komisi X DPR meninjau produk kreatifitas SMK 3 Palangka Raya.

Daya saing suatu bangsa ditentukan seberapa kuat modal manusia yang dihasilkan pendidikan. Kreatifitas yang dihasilkan guru dan siswa perlu mendapat perhatian dan kepedulian dari Pemerintah, sehingga dapat berkembang, memiliki daya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi menggelar pertemuan dengan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli beserta jajarannya, Selasa (3/5). Gubernur Jambi dalam paparannya berharap agar Komisi X DPR RI membantu pembangunan Provinsi Jambi.

Gubernur Zumi Zola menjelaskan bahwa, Jambi sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, untuk meningkatkan daya saing daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi, yang tentunya tidak lepas dari keterbatasan anggaran. Untuk itu, mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, termasuk dari DPR RI, termasuk didalamnya Komisi X.

Untuk memajukan pendidikan sebagai modal dasar dalam pembangunan, Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi terus mengupayakan penyediaan guru yang berkualitas dan melengkapi sarana dan prasarana belajar.

“Saya sampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak membedakan pemberian layanan pendidikan umum dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, sesuai dengan tingkat kewenangan,” ungkap Zumi Zola.

Zola juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi berusaha untuk me-

Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dedi Wahidi mengatakan, Komisi X menemukan kreativitas guru dan siswa yang menghasilkan pembuatan alat produksi dan pencampur bahan-bahan batu bata, serta beberapa alat produksi lainnya. Produksinya ini sudah banyak dipesan oleh beberapa kalangan masyarakat dan beberapa daerah, namun mereka masih mengalami kesulitan dalam permodalan.

“Pemerintah harus peduli kreativitas guru dan siswa. Ini sangat ditunggu masyarakat, dan

Gubernur Jambi Harapkan Komisi X Bantu Pembangunan Daerahnya



Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra bersama Gubernur Jambi

ningkatkan keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia ketenagakerjaan dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik berbasis kompetensi wilayah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota, dengan harapan nantinya mampu menciptakan tenaga kerja yang profesional dan mandiri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra menyampaikan tidak menampik bahwa pendidikan di Provinsi Jambi sampai saat ini masih membutuhkan pembenahan besar-besaran.

“Ke depan Komisi X akan meminta

pemerintah pusat bisa memberikan dana segar yang cukup dari APBN untuk Provinsi Jambi, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan,” ungkap Sutan.

Namun, dia berharap pemkab/kota di Provinsi Jambi mampu mengatasi beberapa permasalahan yang disampaikan tadi dapat diselesaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. “Tidak semua permasalahan yang ada di Jambi diserahkan ke pemerintah pusat, Pemkab/kota di Provinsi Jambi harus belajar bagaimana menyelesaikan persoalan yang kecil,” harap Sutan. ■

(skr), foto : singgih/hr.

pemesanannya sampai mengantri. Mereka masih mengalami permasalahan permodalan, karena kalau tidak diberi bantuan modal untuk pembelian bahan-bahan dan alat, maka akan lambat pertumbuhannya,” kata Dedi Wahidi, di SMK 3 Palangka Raya, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X di Provinsi Kalimantan Tengah, (3/5).

Dedi mengkritik kebijakan prioritas pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu infrastruktur, pangan, energi, maritim, wisata, sedangkan pendidikan tidak masuk prioritas. Menurutnya, ini bertentangan dengan

Undang-Undang dan visi misi Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia, yang memprioritaskan nomor satunya adalah pendidikan, sementara Pemerintah sudah tidak memasukkan pendidikan dalam prioritas pembangunan.

“Ini menjadi permasalahan di masyarakat. Harapan saya laksanakan amanat Undang-Undang 20% bidang pendidikan. Kalau itu dilaksanakan infrastruktur sekolah tercukupi, kualitas siswa dan guru meningkat,” tegas Dedi Wahidi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu (Jawa Barat VIII). ■

(as) Foto: Hindra/hr

Kebijakan Menteri Susi Hendaknya Perhatikan Nasib Nelayan Kecil

Sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, diakui cukup tegas dan bikin takut pelaku pencurian ikan. Namun disisi lain kebijakan tersebut kurang berpihak kepada nelayan kecil.



Tim Kunker Komisi IV DPR tinjau Badan Karantina Perikanan di Kendari.

Kebijakan dan peraturan Kementerian KKP yang tujuannya mencegah *illegal fishing* ini, tidak diikuti dengan program lainnya yang bisa menyelamatkan nasib nelayan tradisional. “Saya mengapresiasi upaya Menteri Susi untuk mencegah pencurian ikan, khususnya oleh asing. Tapi nyatanya, kebijakan lainnya justru menambah kesengsaraan para nelayan,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Ono Suroño dari PDIP saat berkunjung ke Badan Karantina Perikanan di Kendari - Sulawesi Tenggara, Selasa (10/05).

Dia juga menyoroti Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 yang melarang penangkapan lobster, rajungan dan kepiting juga melarang penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik untuk menangkap ikan.

“Banyak Nelayan di Indonesia mengeluhkan tentang peraturan Menteri KKP tersebut misalnya mengenai alat tangkap tradisional yang sudah puluhan tahun

mereka gunakan itu dilarang. Akibat adanya pelarangan serta penangkapan banyak nelayan yang menganggur,” paparnya.

Harusnya, penerapan aturan Menteri

KKP tersebut dibarengi dengan solusi dan proses pendampingan terhadap nelayan yang mengalami dampak peraturan tersebut.

Berdasarkan alasan itu, politikus PDIP ini juga mengusulkan agar Menteri Susi secepatnya mencari solusi dari peraturan yang dibuatnya.

Saat mengunjungi Balai Karantina Perikanan (BKP) Kendari, Komisi IV DPR mengapresiasi Balai Karantina Perikanan Kendari telah mengimplementasi peraturan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) no 1 tahun 2015, berhasil menggagalkan penyeludupan Kepiting sebanyak 316 ekor senilai 77,6 juta.

Berdasarkan Permen tersebut, penangkapan lobster (*Panulirus sp*) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas diatas delapan sentimeter, kepiting (*Scylla spp*) dengan ukuran lebar karapas di atas 15 sentimeter, dan rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dengan ukuran lebar karapas di atas 10 sentimeter.

Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP telah sepakat bahwa Menteri akan merevisi peraturan Menteri KKP No. 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan. ■

(Andri), foto : andri/hr.



Anggota Komisi IV DPR Fadly Nurzal.

Peringatan Harkitnas Jangan Hanya Sekedar Seremonial

Hari kebangkitan nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei bukan hanya sekedar kegiatan seremonial semata, namun lebih kepada sebuah kebangkitan kedua bagi bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan jaman sebagaimana semangat yang diciptakan oleh Budi utomo pada 108 tahun yang lalu.



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany memimpin upacara harkitnas

Hal tersebut diungkapkan Sekjen DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany saat menjadi pembina upacara dalam apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman gedung Setjen DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (20/5).

“Hari Kebangkitan Nasional yang ditandai oleh lahirnya Budi Utomo pada 1908 telah memunculkan SDM (sumber daya manusia) yang terdidik jiwa nasionalismenya, dengan cita-cita mulia melepaskan diri dari penjajahan. Sejalan dengan semangat Budi Utomo itulah sebagai generasi penerus kita harus dapat menjawab berbagai permasalahan bangsa yang ada lewat kerja nyata, mandiri dan berkarakter. Oleh karena itu peringatan kebangkitan nasional kita kali ini mengangkat tema Mengukir Makna Kebangkitan nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, Mandiri dan Berkarakter,” jelas Win, begitu Sekjen DPR RI biasa disapa.

Dari tema tersebut, lanjut Win, ada penekanan dimensi internasional yang harus dilakukan oleh generasi penerus yakni kerja nyata, kemandirian dan karakter diri yang semuanya terpusat pada pemahaman kompetisi global. Kompetisi yang dimaksud bukan hanya pada tetangga di lingkungan sekitar, melainkan lawan tanding yang muncul dari seantero dunia.

Meski demikian dikatakan Win, dengan mengutip pemikiran Presiden Indonesia Pertama, Soekarno yang mengatakan bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, dan membangun teknik pada tahap utamanya adalah membangun jiwa sebuah bangsa. Keahlian merupakan hal yang diperlukan, namun keahlian tanpa jiwa yang besar tidak akan mencapai tujuan. Jiwa yang besarlah yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan bangsa.

“Semoga dengan semangat hari kebangkitan nasional memperbarui semangat Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dan saya yakin dengan jiwa yang besar tadi, bangsa kita bisa mewujudkan itu semua. Indonesia akan semakin berkembang dan maju ke depannya,” pungkasnya. ■

(Ayu) Foto: Rumi/hr

Pemerintah Harus Perkuat Karantina

Anggota Komisi IV DPR RI, Fadly Nurzal meminta pemerintah harus memperkuat perkarantinaan Indonesia. Karena Karantina menjadi sebuah bentuk pertahanan negara.

Hal tersebut diungkapkannya saat Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau Balai Karantina Belawan, Medan Sumatera Utara, Senin (2/5).

“Karantina itu selain untuk kepentingan ekonomi juga ada kepentingan pertahanan negara. Karena di beberapa negara selain terjadi konflik fisik, juga kerap terjadi serangan bakteri, virus atau kuman untuk melemahkan negara lain. Hal inilah yang harus diantisipasi,” ujar Fadly.

Oleh karena itu demi kelangsungan hidup bangsa dan anak-anak negeri, Fadly meminta pemerintah untuk

memperkuat karantina yang merupakan pintu keluar dan masuk barang.

Cara memperkuat karantina itu tidak hanya melalui kemampuan SDM (sumber daya manusia), juga meningkatkan teknologi karantina. Sejauh ini menurut Fadly, teknologi karantina yang Indonesia miliki bisa dikatakan masih belum mumpuni.

“Makin canggih kemungkinan orang luar (negara lain-*red*) untuk mengakali kita, sejatinya semakin tinggi kita mem *protect* negara kita, baik lewat kemampuan SDM dan kecanggihannya alat atau teknologi,” tegas Politisi dari Fraksi PPP ini. ■

(Ayu), Foto: Ayu/hr

Cut Nyak Dien Sosok Inspiratif Pemberdayaan Perempuan Aceh

Sosok pahlawan perempuan Aceh Cut Nyak Dien bisa menjadi inspirasi dalam membangkitkan berbagai program pemberdayaan perempuan di Aceh.



Tim Kunker Komisi VIII DPR meninjau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Aceh.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid saat meninjau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Prima Madani Gampong Nusa Kec. Lhoknga Aceh Besar, Selasa (3/5).

Sodik menambahkan bahwa kehadiran Tim Kunker Komisi VIII DPR tersebut salah satunya dalam rangka melakukan pengawasan atas kinerja Kemen PP dan PA di wilayah Aceh terkait berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami datang untuk memastikan bahwa berbagai program pemberdayaan perempuan yang didukung alokasi APBN pusat di Aceh berjalan sesuai yang diharapkan, antara lain membangkitkan perekonomian keluarga melalui pemberdayaan perempuan,” ungkap politisi Gerindra ini.

Basis dari semua kegiatan baik menyangkut moral, kesehatan, pendidikan anak hingga penguatan ekonomi adalah dimulai dari keluarga. Keluarga yang baik tentu ditopang oleh perempuan (*ibu-red*) yang tangguh. Bahkan Islam mengajarkan bahwasanya perempuan itu adalah tiang

negara. Jika tiang itu rapuh maka negara juga rapuh, sambung politisi Dapil Jabar I ini.

Perempuan Aceh sejak dahulu kala sudah dikenal ketangguhannya karena banyak yang terlibat langsung dalam perjuangan merebut kemerdekaan, papar Sodik. Ini terjadi karena pemahaman perempuan Aceh terhadap agama Islam sangat baik. “Mereka terinspirasi sosok

Siti Aisyah yang juga pernah berperang membantu Rasulullah,” imbuhnya.

Sementara itu, Nurhayati selaku Ketua KUBE Desa Prima Madani menjelaskan ada 3 (tiga) Kelompok Usaha di Gampong Nusa yaitu Kelompok Daur Ulang Sampah, Menjahit dan Kerupuk Tempe. Dan saat ini juga tengah dikembangkan ekowisata dengan konsep homestay (menginap di rumah penduduk-red).

“Kebanyakan wisatawan berasal dari negara Malaysia, dan kami akan terus promosikan ekowisata ini ke negara lainnya. Karenanya kami berharap mendapat perhatian khusus agar bisa menjadi Gampong (Kampung) Model di Aceh,” pinta Nurhayati.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Dahlia menjelaskan bahwa Program Desa Prima Madani bertujuan agar perempuan memiliki skill sehingga ada penguatan ekonomi keluarga. Sejak tahun 2013 sudah terbentuk 297 kelompok sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di desa masing-masing.

“Kemajuan di sebuah desa diharapkan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan berkontribusi menjaga perdamaian di Aceh, sehingga dukungan APBN Pusat sangat kami butuhkan agar perempuan berdaya dan membantu ekonomi keluarga,” pungkas Dahlia. ■

(oji) Foto: odtje/hr

Komisi V Dukung Kupang Bangun Embung

Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi NTT berkesempatan mengunjungi PDAM Kota Kupang. Dalam kunjungannya ini Tim Komisi V dipimpin Ketua Komisi Fary Djemy Francis membahas beberapa hal menyangkut air bersih di kota Kupang.

Yang pertama menyangkut pemahaman Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Provinsi. Ada mekanisme dibangun bersama dan Komisi V berharap ini bisa diselesaikan, sehingga masyarakat dapat menggunakan air bersih dengan baik.

Yang kedua pemenuhan kebutuhan sumber air baku. “Sebelumnya telah di-

adakan pertemuan dengan Gubernur dan Walikota, dan berharap ada permintaan dukungan untuk pembangunan waduk/bendungan. Tetapi masih ada persoalan sosial dan diharapkan bisa diselesaikan sehingga dapat dikembangkan. Nanti kita akan memberikan dukungan apabila persoalan tersebut sudah selesai” ucap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis,

BP3AKB Kalbar Perlu Buat Program Inovatif



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

Komisi VIII DPR mengharapkan adanya inovasi baru yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Badan ini sifatnya pelayanan, sehingga masyarakat datang dibantu dengan inovasi baru sekaligus program pemberdayaan kelompok perempuan maupun anak-anak.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Tim Kunker Saleh Partaonan Daulay kepada pers usai berdiskusi Ketua BP3AKB Kalbar Anna Veridiana Iman Kalis di Pontianak, baru-baru ini. Tim Komisi VIII juga berkesempatan meninjau *Shelter* Bunga Lita di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA).

Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan pemerintah berupa dana dekonstruksi dari Kemen PPA sebesar Rp 550 juta yang diharapkan untuk program pengarusutamaan gender. Saleh menekankan, dana pengarusutamaan gender harus substantif, tidak hanya seminar dan diskusi, pertemuan serta koordinasi, harus ada program riil yang bisa dinikmati ibu dan anak-anak.

Contohnya bagaimana badan ini bisa mengkreasi usaha produktif bagi perempuan supaya tidak hanya berada di sumur, kasur dan dapur tapi juga di pasar atau berdagang. Kemudian program menciptakan kreatifitas anak, menciptakan anak yang cerdas dan sehat.

“Apalagi pengarusutamaan gender, Badan ini aktif mendatangi kaum perempuan supaya lebih berdaya daripada laki-laki. Supaya perempuan tidak diperdaya terus. Kalbar secara umum

belum bisa bersinergi dengan pemerintah pusat Kementerian PPA,” tukasnya.

Problem perempuan dan anak dari waktu ke waktu tidak pernah hilang, kerasan pada ibu-isteri anak-anak pelecehan seksual, anakyang ditelantarkan. Kadang tidak diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Karena itu Komisi VIII dari waktu ke waktu ingin terus memberdayakan Kementerian PPA.

Ketua BP3AKB Anna Veridiana Kalis menjelaskan, Kalbar dengan 5,3 juta penduduk tidak semua bermasalah, masih banyak perempuan dan anak-anak yang berkembang dan berprestasi. Salah satunya di eksekutif ada sekitar seribu orang pejabat struktural, di Propinsi dari 50 SKPD baru 5 orang wanita termasuk staf ahli. Begitu pula di lembaga negara lain baik di lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif, perempuan cukup berperan meski masih kecil.

Khusus dalam kasus kejahatan seksual pelakunya adalah mantan korban. Ada pelaku sodomi setelah ditahan mengaku adalah korban sodomi dan ini yang dikhawatirkan. Karena itu pihaknya membentuk trauma *healing* dengan melibatkan psikolog supaya anak ini melupakan traumanya tak menjadi dendam. Kasus anak korban pelecehan seksual akhirnya menjadi pelaku, memang benar adanya. ■

(mp) Foto: Mastur/hr



Ketua Komisi V Fary Djemy Francis.

Kupang, NTT, Senin (2/5).

PDAM memiliki jumlah sambungan 35 ribu Sambungan Rumah (SR) dengan kapasitas produksi air baku 565 lit/det. Ketersediaan air sangat penting bagi warga kota Kupang, karena iklim Kota Kupang yang panas dan kering.

Menurut anggota Tim Kunker Komisi

V Rendy M. Affandy Lamadjido, tidak efisien jika PDAM hanya mengutamakan air tanah saja. Dia mempertanyakan, kenapa tidak dibuat embung-embung atau bendungan untuk menampung air bersih. Sebab anggaran pengadaan pipa untuk pendistribusian air ke penduduk itu sudah ada di APBN.

Fary menambahkan, ada persoalan besar menyangkut sumber daya air dimana rencana Pembangunan bendungan di Kolhua yang belum tuntas, karena adanya persoalan lahan (persoalan sosial) yang menjadi penghambat. Diharapkan persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar pembangunan dapat berjalan.

Komisi V DPR berharap target prosentasenya pemenuhan air bersih di kota Kupang semakin hari semakin meningkat. “Target pencapaian 50% akan dianalisa kembali dan akan ada penambahan target pemenuhan air bersih ke depannya. Mengenai ketidaksepahaman pembagian peranan antara Kabupaten Kupang dan Kota Kupang harus diselesaikan” ujar Fary. ■

(eno,mp), foto: kresno/hr.

Komisi III DPR Lakukan Sinergi Dengan Gubernur Sulut

Usai melakukan pertemuan dengan beberapa instansi penegak hukum, Komisi III DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut dalam rangka melakukan sinergitas terkait penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana instansi penegak hukum Manado.

“PTUN Manado menyampaikan kepada kami usulan pembangunan gedung baru, dikarenakan gedung yang lama sudah tidak layak. Namun, ada Moratorium dari Presiden menyatakan tidak boleh membangun gedung yang baru” kata Trimedy Panjaitan saat konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut di Kantornya, Manado, Selasa (3/5).

Ia menambahkan, jika tidak dibangun gedung baru, minimal Kantor PTUN dipinjamkan gedungnya, “Tadi sudah kami titipkan para mitra kerja Komisi III kepada Gubernur agar dibantu, sepanjang tidak melanggar aturan,” ujar Trimedy politisi dari Fraksi PDIP ini.

Selain itu, tambahnya, terkait usulan dari Gubernur terkait pemindahan Lapas Kelas II A Manado beserta beberapa instansi penegak hukum, dimana Gubernur



Konferensi Pers Tim Kunker Komisi III DPR dengan Gubernur Sulut.

telah menyediakan lahan sekitar 10 hektar.

Untuk Polda Manado, lanjut Trimedy, Polda Manado tipe B akan diusulkan menjadi tipe A, karena memang sudah layak naik kelasnya. “Hal ini dimaksudkan juga untuk menjaga wilayah pesisir yang berbatasan dengan wilayah Filipina, yang belum lama ada peristiwa penyanderaan oleh kelompok perompak,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPR Herman Hery menambahkan, selain melakukan sinergi, kedatangan komisi III kepada

Pemprov agar memacu penegak hukum di Sulut untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta kinerja para penegak hukum.

Sementara itu, dalam penjelasannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey sangat mendukung perbaikan sarana dan prasarana Penjara, Pengadilan, dan Polda. “Pada dasarnya pemprov sangat mendukung hal ini, bahkan kami telah sediakan lahan untuk melakukan pembangunan gedung baru, supaya ada kenyamanan dari para aparat penegak hukum di Sulut” jelasnya. ■

(jks) Foto: jakarta/hr

Tim Panja Haji Komisi VIII Kunjungi Kanwil Kemenag DIY

Tim Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua M. Sodik Mudjahid didampingi 12 anggota dewan yang merupakan Panitia kerja (Panja) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Kunjungan ini dalam rangka mengevaluasi dan himpun masukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip nirlaba.

Tim Komisi VIII DPR diterima

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DIY Nizar didampingi Tata Usaha, Zainal Abidin, Kepala Bidang Pend. Agama dan Keagamaan Islam, Bardan, Kepala Bagian Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Nurdin dan Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji, Aidi Johansyah. Rabu (17/05).



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI M. Sodik Mudjahid

“Hal ini penting mengingat evaluasi di tingkat daerah sebagai dasar perbaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2017,” kata Sodik dalam pertemuannya dengan jajaran Pimpinan Kanwil Kemenag Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kemenag lima Kabupaten/Kota.

DPR Pertanyakan Lolosnya Marry Jane Dalam Eksekusi Mati Jilid Tiga

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan posisi Marry Jane sebagai narapidana yang sebelumnya masuk dalam daftar eksekusi mati jilid tiga, namun namanya tidak terdapat di daftar nama eksekusi mati jilid tiga tersebut.

Bambang menegaskan dirinya akan menanyakan langsung ke Kejaksaan Agung didalam rapat dengan kejaksaan agung usai reses mendatang, terkait pertimbangan apa yang ada, sehingga Marry Jane tidak di eksekusi mati jilid tiga tersebut.

“Menurut saya, bukan hanya Marry Jane saja, tapi terpidana mati narkoba yang namanya disebut-sebut dan kemarin sudah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan juga sebenarnya tidak masuk dalam daftar yang akan dieksekusi dalam gelombang ketiga ini. Ini juga menimbulkan pertanyaan dan nanti juga akan kita pertanyakan ke Kejagung apa yang melatar belakangi penundaan

hukuman mati di gelombang ketiga ini terhadap napi narkoba itu,” terang Bambang, saat Tim Kunker Komisi III DPR melakukan kunjungan ke Lapas mataram, NTB, Senin (2/5).

Sementara itu, ditempat yang sama, anggota komisi III DPR RI I Putu Sudiartana menegaskan, bahwa keputusan hukuman mati merupakan domain pemerintah, dan DPR hanyalah sebagai pengawas Konstitusi. Namun, politisi partai Demokrat dapil Bali tersebut memaparkan, jika memang keputusan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini kejaksaan agung adalah yang terbaik bagi kelangsungan negeri ini, selama itu juga DPR mendukung. Mengingat, menurut Putu, jika kasus Marry Jane bersinggungan soal *human trafficking* sudah pasti kedua negara yang bersangkutan yaitu Indonesia dan Filipina akan bersinergi dalam menyelesaikannya.

“Tanggapan kami, terutama saya dari dapil Bali melihat, bilamana itu bermanfaat bagi negara lanjutkan, apa yang dilaksanakan oleh Presiden atas nama negara silahkan. Mungkin ada hubungan yang mesti harus dijaga dengan

baik antara Filipina dan Indonesia, mesti harus kita jaga, saya objektif melihat kebijakan Jokowi, dan saya selaku



Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana.

pribadi mendukung bila itu ada kepentingan yang lebih besar demi negara kita bersatu,” tandas Putu.

Seperti diketahui, Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan persiapan dan koordinasi pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga sudah dilakukan dan hanya menentukan tanggal pelaksanaannya. Prasetyo juga mengungkapkan dalam eksekusi mati tahap ketiga ini, terpidana mati Marry Jane asal Filipina, kembali ditunda. Sebelumnya, dia ditunda eksekusinya setelah dia mengaku sebagai korban *human trafficking* atau perdagangan manusia. ■

(dya) Foto: Nadya/hr

Menurut Sodik, selain di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta evaluasi laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 juga dilakukan di Provinsi Jambi. Evaluasi di tingkat Provinsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan data laporan secara mendetail selain laporan keuangan di tingkat Kementerian Agama Pusat.

“Ini sebagai sampel Laporan Keuangan di Tingkat Daerah, setelah sebelumnya kami juga mendapatkan laporan secara nasional,” kata dia.

Lebih lanjut Sodik, mengatakan bahwa, evaluasi itu penting dilakukan sebagai syarat utama dalam menentukan BPIH pada tahun berikutnya. Kendati BPIH Tahun 2016 akhirnya dapat ditetapkan, tetapi evaluasi lanjutan penting dilakukan sebagai perbaikan penetapan

BPIH Tahun 2017 yang akan datang.

Apalagi berdasarkan evaluasi Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 2015 oleh Kemenag RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat menemukan 16 ketidaksesuaian administrasi penyelenggaraan haji, meski menurut Sodik belum tentu terindikasi korupsi.

“Memang tidak terindikasi korupsi, namun lebih kepada lemahnya pengadministrasian di lingkungan Kementerian terkait. Ini yang menyebabkan penetapan BPIH Tahun 2016 lebih lambat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Nizar mengatakan, selama ini pihaknya selalu mengutamakan transparansi anggaran penyelenggaraan haji di tingkat daerah, seperti ongkos

pembiayaan operasional layanan, fasilitas akomodasi dan transportasi, serta hak-hak yang harus diketahui calon jamaah haji.

“Evaluasi yang dilakukan Komisi VIII DPR ini sangatlah penting, karena kemudian dapat diketahui biaya mana yang sekiranya dapat diefisienkan,” kata Nizar.

Lebih lanjut dikatakan, kuota Jamaah Haji untuk Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berangkat pada Tahun 2016 mencapai 2.455 orang ditambah 19 petugas daerah, sama dengan kuota Tahun 2015. Berdasarkan data hingga Maret 2016, jumlah daftar tunggu Calon Jamaah Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 54.000 orang dengan masa tunggu mencapai tahunan. ■

(hr) Foto: Hindra/hr

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Prancis di Kupang, Selasa, (3/5) mengatakan bahwa Komisi V DPR telah bersepakat untuk menghindari sistem kontrak untuk pendamping dana desa.

“Kesepakatan Komisi V dengan Menteri Desa adalah manfaatnya dana desa, siapa yang menerimanya harus jelas, dan diharapkan penggunaannya melalui pemberdayaan masyarakat setempat,” jelas Fary Djemi.

Menurut Fary, ada dua kriteria didalam permasalahan dana desa ini, yaitu pemberdayaan masyarakat setempat dan kriteria dari pendamping desa haruslah masyarakat setempat.

“Kita sepakati, kita minta memanfaatkan anak-anak atau masyarakat setempat, bagaimana membangun pertemanan untuk penyaluran dana desa. Kalau pendamping desa didatangkan dari luar, mereka tidak

Hindari Sistem Kontrak Untuk Pendamping Desa



Tim Kunker Komisi V DPR meninjau tata kelola dana desa dan pendamping desa di Kupang

akan bisa diharapkan, karena orang luar tidak tahu kondisi desa yang mereka datang, tidak mengetahui tokoh-tokoh setempat, Jadi akan sulit untuk menyalurkan dana desa tersebut,”terang Fary.

Lebih lanjut, ia menambahkan, bahwa dari pelaksanaan penyaluran dana desa tahun

2015, masih banyak kekurangan dan perlu diperbaiki.

“Komisi V DPR RI telah melakukan evaluasi penyaluran dana desa dan banyak kekurangan dan banyak hal yang perlu diperbaiki. Tahun ini diharapkan lebih baik,” kata politisi Partai Gerindra itu. ■

(eno), foto: Kresno/hr

Komisi III DPR Soroti Pengelolaan Lapas Kelas II A Manado

Pengelolaan Lapas harus konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam UU tersebut, pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

“Saya menyoroti pengelolaan Lapas sebagai lembaga yang membina warga binaan pemasarakatan, artinya apa, kalau Warga Binaan ini diberdayakan dengan baik, secara tidak langsung produktifitas mereka makin baik. Sehingga ketika mereka keluar dari Lapas, sudah menjadi orang-orang yang siap berkompetisi di masyarakat” kata Anggota Komisi III Daeng Muhammad saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kakanwil Hukum dan Ham Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/5).

Ia mencontohkan, di Cikarang ada 4200 pabrik, namun tidak pernah dimanfaatkan oleh Kemenkumham, “Jika saya berada di jajaran bapak-bapak di Kemen-

kumham, ada potensi sebetulnya yang bisa divendorkan di dalam Lapas. Kami di Komisi III DPR akan mendukung jika penganggaran yang ada terukur” ujar politisi F-PAN ini.

Sementara Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio mengatakan, Lapas Kelas II A Manado seharusnya melakukan pendataan kemampuan para narapidana, sehingga bisa diberdayakan dan menghasilkan suatu produk.

“Saya melihat di Lapas ini hanya banyak melakukan

MoU saja, namun tidak berjalan. Hal itu dikarenakan Lapas bingung apa yang mau dikerjakan. Saya menyarankan agar yang dibangun UMKM terlebih dulu baru Koperasi,” terang politisi F-PDI Perjuangan itu.

Ia meyakini, banyak pengusaha yang menginginkan jasa narapidana, contohnya di Jawa Barat, ada Lapas yang membuat bola untuk piala dunia.

Kadiv Pemasarakatan, Anthonius Ayorbala menerangkan, saat ini disetiap kantor wilayah menempatkan satu Lapas Industri skala kecil, menengah dan besar.

Menurutnya, potensi Lapas di Sulut ini lebih banyak di sektor pertanian. Untuk diketahui, saat ini kami memiliki lahan di Lapas Tondano dan Lapas anak Temohon. Lewat MoU yang sudah dilakukan dengan Bank Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah diupayakan mengembangkan pertanian dan mungkin dalam beberapa bulan ini akan ada panen perdana yaitu cabe dan jagung. ■



Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad

(ik) foto: Jaka/hr



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau Pergudangan Bulog Kaligi di Papua Barat.

Keberadaan Bulog Masih Penting

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai keberadaan Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) masih penting untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Wacana pembubaran Perum Bulog merupakan wacana yang tidak memiliki dasar karena Perum Bulog merupakan lembaga penyangga dan penjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Herman Khaeron dalam dialognya dengan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kadivres Papua dan Papua Barat beserta jajaran di Komplek Pergudangan Bulog Kaligi, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa (10/5) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPR ke Provinsi Papua Barat.

“Di periode yang lalu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur ingin mencoba fungsi Bulog diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Kami beri waktu satu bulan, ternyata menyerah. Jadi saya termasuk orang yang tahu bagaimana kerja Bulog kerja aparatur Bulog, sehingga saya katakan kalau masih ada yang berpikiran bahwa

Bulog itu dibubarkan saja, prinsip ketahanan pangannya digantikan oleh *e-money*, dari mana dasar pemikirannya itu,” katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, tidak mungkin peran Perum Bulog dengan tugas sebagai stabilisator harga dan penugasan atas stok nasional bekerja tidak ada institusinya dan hanya mengganti dengan *e-money*.

“Bagaimana jalan pikirannya, bahkan ada yang dengan emosional Bulog bubarkan saja. Lah kalau dibubarkan ada rakyat mengalami kemiskinan, ada rakyat kelaparan. Di Papua Barat siapa yang mau bertanggung jawab? Darimana akan dilakukan mobilisasi kebutuhan pokok, itu tidak bisa,” heran Herman.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu

menambahkan, justru Perum Bulog harus diperkuat. Bahkan Perum Bulog harus ditugasi bukan hanya untuk urusan beras saja tetapi dikembalikan kepada sembako.

“Bahkan kemarin sudah kami putuskan untuk tujuh komoditas selain beras ada kedelai gandum gula daging sapi dan berbagai produk hortikultura, hanya untuk stok bilamana terjadi harga yang tidak stabil dan jika dalam sebuah lokasi atau wilayah, memang komoditasnya berkurang, tidak ada atau langka,” jelasnya.

Meski begitu, ia juga mengingatkan sistem pengawasan terhadap Perum Bulog agar bekerja dengan baik. “Utamanya para kepala gudang karena sering kali banyak kasus di Indonesia yang melibatkan kepala gudang, contoh terakhir kepala gudang di Semarang. Ini harus hati-hati, karena ini adalah keuangan negara, diaudit dengan sangat teliti oleh BPK, dan diteliti oleh internal Bulog, diaudit oleh Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), dan kami (DPR) juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi raskin ini,” tegasnya. ■

(nt) Foto: Nitra/hr

DPR Minta Jokowi Serius Dorong Proyek Mobil Esemka

Anggota Komisi X DPR RI Muslim, mengharapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam rangka mendorong proyek mobil Esemka, sehingga Produk Otomotif Indonesia bisa dibanggakan.



Tim Kunker Komisi X DPR meninjau karya otomotif SMK di Palangka Raya.

Politisi Partai Demokrat ini melihat, seperti Mobil Timor pada era-Soeharto, kemudian era-Jokowi dengan Mobil Esemka, tapi sampai hari kita lihat Pemerintah tidak serius dalam mengembangkan proyek mobil nasional.

“Kita (DPR RI) berharap ketika Esemka ingin didorong untuk terus dikembangkan sebagai industri otomotif di Indonesia, harus serius betul, sehingga produk anak-anak bangsa di bidang otomotif ada yang bisa dibanggakan,” kata Muslim, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi X, di Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (3/5).

Menurutnya, potensi pasar Indonesia sangat luar biasa, kalau ini kita dorong dengan serius, maka akan banyak tenaga kerja yang akan diserap.

“Saya minta kepada Pemerintahan Jokowi kalau ingin betul-betul mendorong mobil nasional ini harus serius, sehingga hasil yang didapat maksimal dan layak untuk dipakai rakyat Indonesia,” tegas Muslim.

Setelah Komisi X melihat secara langsung kondisi beberapa sekolah

dalam kunjungan kerja hari itu, mulai SMA, SMK, SMP unggulan di Palangka Raya, Muslim meminta sekolah-sekolah kejuruan harus mendapat perhatian

serius Pemerintah. Misalkan jurusan otomotif yang sudah tidak layak lagi karena masih menggunakan mobil-mobil tahun 70-an dan kondisi mobil sangat memprihatinkan.

Komisi X berharap juga Pemerintah Daerah ada perhatian khusus, termasuk Dinas Pendidikan, sehingga hasil karya dari SMK ini juga harus punya daya saing. Apalagi era hari ini, Pemerintah negara anggota Asean memberlakukan MEA.

“Saya pikir kita harus dorong terus kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, maka dengan kehadiran Dinas Pendidikan, diharapkan juga ada dukungan, sehingga siswa setelah lulus siap pakai,” ungkapnya.

Oleh karena itu, diharapkan adanya revitalisasi alat praktek sekolah kejuruan dengan dilengkapi mesin-mesin industri, seperti mesin bubut dan lain sebagainya. Sehingga karya-karya para siswa harus terus berjalan dengan perkembangan kondisi hari ini. ■

(as), foto : agung/hr

Pembinaan UMKM Untuk Kuatkan Ekonomi Masyarakat

Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan, pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menguatkan ekonomi lokal masyarakat. Apalagi, dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit dan persaingan global.

Demikian dikatakannya saat memberikan pembinaan terhadap para pelaku industri kelanting, yang tergabung dalam Kelompok Kelanting Mitra Tani, di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan,

Kabupaten Lampung Timur, Lampung, belum lama ini. Hal ini terkait kunjungan kerja perorangan dalam masa reses di daerah pemilihannya, Lampung II.

“Pembinaan terhadap UMKM ini untuk menguatkan ekonomi lokal masyarakat. Di tengah himpitan ekonomi saat ini, saya akan membina mereka melalui koperasi sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan,” kata Dwita Ria.

Selain memberikan pembinaan, selama kunker ini, politisi F-Gerindra ini juga melakukan berbagai kegiatan bagi masyarakat daerah pemilihannya seperti Revolusi Putih, pelatihan kader anti

Komisi X Tinjau Sekolah Apung di Kota Jambi

Bangunan sekolah di Kota Jambi, ternyata masih ada yang tidak layak dan membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Salah satunya adalah SD Negeri 68/IV Kota Jambi. Melihat kondisi tersebut, Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra meninjau langsung kondisi sekolah tersebut yang berlantai kayu dengan struktur bangunan rumah panggung dan berada di atas sungai, Rabu (4/5).

Fasilitas ruangan di sekolah tersebut, terlihat cukup memprihatinkan. Ruang-ruang kelas masih merupakan bangunan tua, dek-dek yang bocor serta dinding yang sudah berlubang. Bahkan, keadaan pagar di koridor sekolah yang tidak permanen, tak urung membuat khawatir orang tua siswa sekolah ini.

“Jika banjir datang, pagar sekolah ini menjadi tempat untuk mengikat tali perahu warga yang ingin pergi ke luar, dan tiap habis banjir pula, pagar itu selalu di renovasi,” ungkap salah seorang warga menjawab pertanyaan dari Komisi X.



Tim Kunker Komisi X DPR tinjau Sekolah Apung di Jambi

Komisi X DPR yang meninjau langsung kondisi sekolah tersebut merasa prihatin dan berharap pemerintah segera memperhatikan. Anggota Komisi X Elviana berharap SD Negeri 68/IV Kota Jambi bisa dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi, agar ketika banjir tidak semakin membahayakan siswanya.

“Kita mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah untuk pem-

angunan sekolah ini, khususnya ruang kelas dan pagar pembatas, atau lebih bagus lokasinya dipindahkan, jika sarana dan prasarana sekolah memadai, tentu akan menambah minat belajar dari siswa,” ungkap Elviana.

SD Negeri 68/IV Kota Jambi memiliki siswa-siswi sebanyak 263 orang, dimana mayoritas Siswa-/i merupakan dari keluarga tidak mampu. Anggota Komisi X Popong Otje Djundjungan, masuk ke dalam kelas-kelas yang ada di SDN 68/IV Kota Jambi dan dalam kesempatan tersebut memberikan motivasi dan semangat kepada siswa/i nya.

Sementara Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra yang juga didampingi Kadis Pendidikan Provinsi Jambi meminta agar pemerintah segera merenovasi atau merelokasi sekolah tersebut.

“Kita meminta agar SDN 68/IV Kota Jambi segera di renovasi atau direlokasi, agar mereka belajar juga dapat dengan nyaman tanpa ada kecemasan,” ungkap Sutan.

Lebih lanjut Sutan meminta agar seluruh Siswa di SDN 68/IV Kota Jambi di daftarkan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar yang telah diprogramkan pemerintah.

“Saya minta agar seluruh siswa di SDN 68/IV Kota Jambi didaftarkan untuk menerima Kartu Indonesia Pintar yang telah di programkan pemerintah,” harapnya. ■



Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi tinjau UMKM Lampung.

narkoba, hingga bedah sekolah. Ia mengaku mendapat banyak aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat selama kunker ini.

“Reses adalah momentum yang sangat tepat untuk mendengar langsung

aspirasi dan mengawasi berbagai program kerja Pemerintah, selain itu kita bisa memberikan kerja-kerja nyata secara langsung kepada masyarakat,” janji Dwita Ria. ■

(st) Foto: Sofyan/hr

(skr), foto: singgih/hr



P2TP2A dan Dinas Syariah Perlu Sinergi Bendung Pornografi dan Narkoba Di Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh perlu bersinergi dengan Dinas Syariah Aceh untuk bahu-membahu menangkul maraknya penyebaran pornografi dan narkoba.

Demikian diungkapkan Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo, Anggota Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja ke Kantor P2TP2A Provinsi Aceh baru-baru ini.

Dirinya cukup prihatin karena ketika membicarakan anak-anak muda Aceh kerap kali identik dengan ganja, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih cukup tinggi. Faktor tingginya penyebaran dan pemakaian narkoba (ganja) di kalangan anak muda Aceh tentu bisa menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

“Konseling kejiwaan bagi para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta program rehabilitasi para pecandu narkoba sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebarannya,” saran Rahayu. Politisi Gerindra ini juga menekankan bahwa pemahaman akan bahaya (efek negatif) teknologi informasi melalui berbagai media sosial (medsos) yang mengandung konten pornografi, *cyber sex*, paham radikal

Tim Kunker Komisi VIII mengunjungi Kantor P2TP2A di Aceh.

serta aliran sesat tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi orang tua juga perlu mendapat pembelajaran.

Butuh solusi kreatif misalnya melalui pendidikan kesehatan untuk meredam dampak dari pergaulan bebas, dengan menjelaskan risiko tertular berbagai penyakit berbahaya seperti HIV AIDS jika melakukan seks pranikah secara tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, di Pakistan yang notabene juga mayoritas muslim dengan pakaian tertutup (hijab) namun kasus pemerkosaan di sana juga tinggi.

“Ini artinya gaya berpakaian masyarakat tidak sepenuhnya bisa menjamin dari ancaman kasus pemerkosaan, jika berbagai sumber pemicu seperti pornografi di media sosial dan narkoba tidak secara serius dibendung dan diberantas,” ungkap Politisi Dapil IV Jateng ini.

Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah menyoroti maraknya kasus orang tua melantarkan anak-anak terutama di daerah-daerah miskin. Oleh karenanya peran P2TP2A sangat strategis dalam rangka memberikan ketrampilan perempuan-perempuan yang hidup di kantong-kantong kemiskinan.

“Jika para perempuan ini diberi ketrampilan yang cukup, maka bisa membantu para suami menghidupkan roda perekonomian keluarga sehingga kasus melantarkan anak bisa diredam,” terang Ledia. Politisi PKS ini juga berharap P2TP2A Provinsi Aceh lebih proaktif turun ke lapangan melakukan pendekatan-pendekatan ke daerah rawan

kemiskinan tanpa harus menunggu adanya laporan kasus dari masyarakat.

“Saya yakin para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual perempuan dan anak ini masih banyak yang tidak berani melaporkan kasusnya di luaran sana, karena selain ini menjadi aib keluarga, seringkali pola penyelesaian kasusnya hanya dengan cara kekeluargaan saja tidak sampai ke ranah hukum,” ungkap Ledia.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, Dahlia didampingi Ketua P2TP2A Aceh Dian Marina mengungkapkan penerapan syariah Islam di bawah pengawasan Dinas Syariah Aceh perlahan tapi pasti mampu berkontribusi menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Secara umum masyarakat Aceh mendukung penerapan syariah, terlihat dengan kian diminatinya PAUD IT, gerakan shubuh berjamaah oleh berbagai kelompok masyarakat juga makin ramai, sedangkan pertentangan (penolakan) syariah lebih banyak muncul dari luar Aceh,” terang Dahlia.

Dahlia menjelaskan, berdasarkan data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak di Aceh tahun 2015 lalu mencapai 16 kasus, sedangkan sampai bulan April 2016 sudah terjadi 3 kasus. Sedangkan KDRT terhadap perempuan tahun 2015 mencapai 47 kasus, dan sampai bulan April 18 kasus. Kasus pemerkosaan tahun 2015 lalu juga masih terbilang tinggi mencapai 15 kasus. ■

Tax Amnesty Bagian Kecil dari Reformasi Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu dia menganjurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan.

“Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan *tax reform*, *tax amnesty* tidak berdiri sendiri, *tax amnesty* hanya bagian kecil dari *tax reform*,” ujar Sarmuji menyarankan, hal demikian disampaikannya saat diwawancarai belum lama ini di Gedung Nusantara I DPR.

Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, pengampunan pajak tidak bisa dengan serta merta mengabaikan penegakan hukum. Jika memang perlu diberikan sanksi bagi para pengingkar pajak, seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Terutama setelah semua hal itu dilakukan, semua penegakan hukum dilakukan, pemberian sanksi dilakukan. Kalau memang perlu diberikan sanksi, baru kita pikirkan *tax amnesty*,” papar Sarmuji.

Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini juga mengatakan, jika reformasi perpajakan di dahulukan maka akan



Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji

memberi jaminan kepada para wajib pajak, bahwa sistem perpajakan di Indonesia berlaku adil.

“Karena untuk orang yang mau diampuni pajak, melakukan repatriasi ke dalam negeri, mereka juga harus yakin bahwa sistem perpajakan yang ada itu *fair* adil bagi pembayar pajak. Bukan sistem yang kacau, petugas pajaknya sewenang-sewenang misalkan,” sergah Sarmuji.

Dia juga berargumen, pengampunan pajak tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang, terlebih lagi berdekatan tahunnya. “*Tax Amanesty* itu dilakukan satu generasi sekali cukup. Satu generasi itu berapa tahun, ya barangkali dua puluh lima tahunan. Tapi waktunya jangan ditentukan. Dua puluh lima sampai tiga puluh lima tahun, dengan segala konsekuensinya,” harap Sarmuji.

Dia mengakui pengampunan pajak bagi DPR sebenarnya dilematis. Karena, meski DPR dihadapkan pada tujuan baik yang sudah ditentukan pemerintah, yakni terjadinya repatriasi modal. Namun ada pertanyaan besar, apakah betul pengampunan pajak sungguh-sungguh akan menyebabkan pemulangan kembali modal besar-besaran ke dalam negeri.

“Yang dikhawatirkan dari *tax amnesty* ini merusak sistem perpajakan. Karena orang menunggu nunggu, nanti toh ada *tax amnesty*,” ungkap Sarmuji dengan rasa khawatir. ■

(eko) foto : anef/hr

Setjen DPR Klarifikasi Dugaan Kunker Fiktif

Sekretariat Jenderal DPR RI mengklarifikasi berita adanya dugaan kunjungan kerja fiktif sebagaimana diberitakan beberapa media sebelumnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna.

“Setjen DPR tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR. Termasuk kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” terangnya.

Sehingga Ia menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan kerugian negara adalah tidak tepat. “Namun lebih pada dugaan potensi yang belum dapat diyakini keterjadiannya karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam Tata Tertib DPR pasal 211 ayat (6) dijelaskan bahwa laporan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksi masing-masing. Sehingga saat ini Setjen DPR masih dalam proses menghimpun laporan kunjungan kerja Anggota DPR untuk disampaikan kepada BPK.

“Saat ini Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan kunker tersebut kepada BPK,” paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa laporan kunjungan kerja yang dibuat Anggota DPR untuk disampaikan kepada BPK saat ini jumlahnya semakin bertambah. “Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah,” pungkasnya. ■



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Suratna

(hs) Foto : Rumi/hr

Komisi X Minta Solusi Tak Lolos SNMPTN Ratusan Siswa SMAN 3 Semarang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyangkan tak lolosnya 380 siswa-siswa SMA Negeri 3 Semarang ke Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016.

Panitia SNMPTN berkilah, hal ini diakibatkan oleh kekurangan input data pihak sekolah. Sutan meminta harus ada solusi terhadap permasalahan ini.

“Kita sudah tak boleh memandang siapa yang salah, tapi kita harus cari solusi. Kita minta Dinas Pendidikan, sekolah, dan panitia SNMPTN harus cerdas. Harus segera cari solusi. Anak bangsa jangan sampai dikorbankan,” kata Sutan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Jumat (13/5).

Politisi F-Gerindra itu tak rela jika siswa-siswa SMAN 3 Semarang jadi korban kesembronoan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan Semarang diminta bergerak mencari solusi bagi siswa-siswa itu.

“Dinas Pendidikan harus segera melakukan komunikasi dengan Kemenristek Dikti, menyelesaikan kekecewaan para siswa akibat kesalahan dari regulasi di sekolah. Saya tidak rela anak-anak dikorbankan, tentang bagaimana teknisnya, tentu eksekutif lebih paham, ini jangan ditunda-tunda,” tegasnya.

Sutan juga meminta ada evaluasi sistem. Kesalahan yang sama tak boleh terulang di masa depan. “Harus dilakukan evaluasi. Bandingkan data tahun lalu, kalau perbedaannya

signifikan, berarti jelas harus ada evaluasi,” pinta politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara di kesempatan berbeda, Menristek Dikti M Nasir yakin ratusan siswa itu tetap berpeluang masuk ke PTN. Ia menjelaskan, selain SNMPTN, masih ada dua jalur lagi yang bisa ditempuh oleh mereka yang tak lolos. Dua jalur itu yakni SBMPTN yang pendaftarannya mulai dibuka sekarang, dan jalur Ujian Mandiri di tingkat lokal.

“Kalau saya sarankan ke SMA 3 Semarang, silakan mendaftar ke SBMPTN dengan mengikuti prosedur yang ada,” saran Nasir.

Sebagaimana diketahui, SNMPTN adalah seleksi yang memakai komputer dan sistem berdasarkan PDSS *online*. PDSS ini memuat data-data siswa, termasuk riwayat nilai rapor dari tahun pertama hingga tahun terakhir siswa.

Sekolah di haruskan memiliki *database* siswa

hingga riwayat nilai rapornya dan mengunggahnya ke sistem yang dinamakan PDSS *online*. Dari sistem ini, tiap siswa akan memperoleh *password* yang berbeda dan kemudian *password* ini dibagikan dari sekolah ke siswa.

Melalui *password* yang dimiliki, siswa memverifikasi data dan kemudian mendaftar SNMPTN memilih 2 jurusan dari 2 PTN, salah satu PTN harus berada di kota asal siswa. Siswa juga diminta mengunggah fotonya, kemudian siswa nanti akan mendapatkan kartu tanda pendaftaran.

Kepala sekolah memberikan rekomendasi pada setiap siswa yang mendaftar. Bagi yang mendaftar di cabang olahraga dan seni, harus pula mengunggah portofolio karya dan prestasinya. Proses seleksi berdasar data-data akademis selama bersekolah di SMA itu. ■

(sf) Foto: Azka/hr



Ketua Komisi IV Dorong Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mendorong pemerintah untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Hal tersebut diungkapkannya usai sidang paripurna DPR, Senayan, Selasa (17/5).

“Indonesia sangat mungkin mencapai kedaulatan pangan, pertama karena mayoritas penduduk Indonesia mata pencariannya di sektor pertanian. Kedua iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering, hal ini memungkinkan untuk bisa ditanami sepanjang tahun. Ketiga enam puluh persen cadangan pangan di Khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal Ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. Kita memiliki tanah yang sangat subur. Kondisi-kondisi demikian merupakan peluang besar bagi negara kita,” papar Edhy.

Sayangnya, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, dari tahun ke tahun sistem pengelolaan pangan di Indonesia masih tidak berubah.

Setiap Ramadhan, Idul Fitri, tahun baru dan hari-hari besar lainnya terjadi kelangkaan pangan. Ia melihat ada yang salah yakni lebih kepada tata kelola yang kurang baik.

Setiap Ramadhan, dan hari-hari kelangkaan ada yang salah yakni lebih kepada tata kelola yang kurang baik.



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat kunjungi Gudang Bulog Sumut

“Kalau penekanan masalahnya hanya pada produksi, saya melihat tidak juga. Karena cadangan beras kita di Bulog itu ada lebih dari dua juta ton, artinya kita punya kemampuan. Ada peningkatan tanam. Ada empat ratus ribu hektar pertambahan tanaman baru, dan ini bisa ditingkatkan lagi. Sehingga jika bicara tentang produksi pangan kita bagus, tidak ada masalah,” ungkapnya.

Oleh karena itu Edhy mendorong Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sebagai pengelola distribusi pangan untuk berkordinasi dan bekerjasama dengan baik. Sektor perdagangan jangan merasa karena memiliki hak impor maka *mindset* nya selalu impor. Hanya karena satu kota yang mengalami kelangkaan maka menganggap hal itu juga berlaku bagi kota lain. Sehingga langsung mengambil langkah impor. Padahal kondisi satu daerah berbeda dengan daerah lainnya.

“Misalnya saja beberapa waktu lalu, di Bandung hanya cabai mencapai 45 ribu per kilo, ketika pemerintah akan impor cabai ternyata di Cianjur harga cabai berkisar 20-15 ribu per kilo, cabai dalam negeri malah surplus. Untungnya impor bisa digagalkan, kalau tidak petani semakin menjerit karena harga semakin jatuh. Oleh karena itu perlu kerjasama dan kordinasi yang baik antara Menteri Pertanian dan Perdagangan, agar semuanya berjalan dengan baik, masyarakat dan petani dalam negeri pun tercukupi, dan Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan,” pungkasnya. ■

(Ayu) Foto: Ayu, Rizka /hr

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo



BERITA BERGAMBAR



Tim Kunker Komisi IV DPR Kunjungi Gudang Penyangga Pupuk PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kaltim (PKT) dan gudang Bulog di Kendari Selasa, (10/5) Foto : Andri/hr



Tim Kunker Komisi VIII DPR dipimpin Sodik Mudjahid saat meninjau pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kantor Pos Banda Aceh, Senin (2/5) Foto : Naefuroji/hr



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah saat meninjau Kelompok Usaha Bersama (KUBE-FM) Maju Bersama hasil binaan Dinas Sosial Aceh di Kota Banda Aceh, Senin(2/5) Foto: Naefuroji/hr



Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR saat meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Papua Barat, Selasa (3/5). Foto: Husen/hr



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 0811 9443 344



@dpr_ri



DPR RI



@DPR_RI



DPR RI